

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat tiga komponen utama dalam pelaku ekonomi di Indonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta serta Koperasi. Tiga komponen utama ini memiliki pangsa pasar masing-masing yang dimana satu dengan yang lain saling terkait. Akan tetapi, peranan BUMN semakin lama semakin meningkat dalam perekonomian. Hal ini dibuktikan melalui jumlah aset BUMN yang dimana pada tahun 1998 sebesar Rp 438 triliun dan pada tahun 2017 jumlah aset BUMN mencapai Rp 7.200 triliun dan dilansir dalam www.kompas.com kini sepanjang tahun 2018 total aset BUMN mencapai Rp 8092 triliun dan akan terus meningkat setiap (Setiawan, 2019). Sehingga pada saat ini terdapat 20 BUMN yang telah *go public*.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah BUMN

Sumber : <http://www.bumn.go.id/berita/0-Statistik-Jumlah-BUMN>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN sendiri memiliki sektor-sektor usaha perekonomian seperti bank,

pertambangan, telekomunikasi, logam dan lain-lain. Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2004 hingga tahun 2017 mengalami jumlah penurunan BUMN hal ini dikarenakan peleburan dari beberapa BUMN menjadi satu perusahaan, dan dari tahun 2004 hingga 2017 BUMN yang *go public* mengalami kenaikan pada tahun 2007 dan terus meningkat hingga tahun 2016.

Tujuan dari perusahaan yaitu untuk mencari keuntungan, baik itu dari perusahaan swasta, koperasi maupun BUMN. Akan tetapi, tujuan dari BUMN tidak hanya mencari keuntungan, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 2 BUMN juga turut aktif berkembangnya perekonomian nasional, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang memiliki mutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup masyarakat Indonesia, serta aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Setiap perusahaan mempunyai tujuan tersendiri. Perusahaan yang dikelola secara stretegis pada umumnya memiliki tujuan laba yang biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham. Salah satu alat untuk menilai perusahaan adalah analisis keuangan, akan tetapi analisis keuangan hanya menjadi sebuah patokan untuk menilai perusahaan tersebut. Ada pendekatan lain yang tidak kalah penting dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu adanya penerapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dalam suatu perusahaan (Marius & Indah, 2017).

Pada zaman sekarang, perusahaan tidak hanya mencari keuntungan saja akan tetapi harus memperhatikan penerapan dari *Good Corporate Governance* tersebut. Seperti yang terjadi pada saat kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001, dimana perusahaan terbukti melakukan manipulasi akuntansi hingga harga saham menjadi turun drastis. Hal tersebut berdampak kerugian bagi semua pihak, baik dari para pemegang saham, investor, dan karyawan (Solihin, 2015).

Kasus yang terjadi pada perusahaan Enron disebabkan oleh tidak diterapkannya *Corporate Governance* yang baik. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa peran *Good Corporate Governance* sangat penting bagi perusahaan.

Menurut Amanti dalam Indrawati (2018), *Good Corporate Governance*

dikatakan mampu meningkatkan nilai perusahaan, dengan begitu diharapkan dapat mempunyai kinerja yang baik sehingga mampu menciptakan keuntungan bagi para pemilik perusahaan atau pemegang saham (Indrawati, 2018).

Dalam *Good Corporate Governance* sendiri terdapat beberapa komponen yang penting dalam menjalankan suatu perusahaan antara lain kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas auditnya sendiri.

Salah satu bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat digunakan dari hasil *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dikeluarkan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Program tersebut bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas *Governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan. CGPI adalah bentuk penilaian dan penghargaan terhadap upaya perusahaan dalam menerapkan GCG serta mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat (Widodo, 2015).

Good Corporate Governance sendiri diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu, dengan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah nilai perusahaan. (Retno, M. & Priantinah, 2012)

Prinsip *Good Corporate Governance* sendiri ada lima yaitu *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggungjawab), *Independency* (kemandirian), *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan) (Pamungkas, 2013). Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari *Good Corporate Governance* yaitu dengan pelaksanaan dari *Corporate Social Responsibility*.

Dilansir dalam berita CNN Indonesia yang ditulis oleh Riva Dessthanian Suastha pada Juli 2016. Riset yang dilakukan oleh *Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore* (NUS) *Business School*. Melakukan riset terhadap 100 perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand. Yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kualitas implementasi CSR lebih rendah dibandingkan Thailand. Nilai 56,8 dari total 100 untuk Thailand, sementara Singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan Malaysia

sendiri masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. (Suastha, 2016)

Dari berita diatas dapat disimpulkan bahwa *Corproate Social Responsibility* di Indonesia masih dikategorikan rendah dibandingkan Negara ASEAN yang lainnya. Hal ini membuktikan kualitas dari CSR di Indonesia masih rendah.

CSR di Indonesia sendiri sudah dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggungjawab sosial, dan perusahaan yang kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggungjawab sosial. Tercantum dalam peraturan menteri BUMN melalui Keputusan Nomor KEP-04/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberikan arahan mengenai operasional tentang praktik dari tanggungjawab sosial tersebut. (Febrianti dalam (Pamungkas, 2013).

Salah satu program CSR yang dilaksanakan oleh BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), program tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN dari sektor manapun sesuai dengan keputusan menteri BUMN yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1983 yang berisikan bahwa BUMN harus turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, terlebih kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. Dan seiring dengan berjalan waktu program dari BUMN terus berkembang hingga pada tahun 1944 berubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) dan berkembang lagi menjadi PKBL.

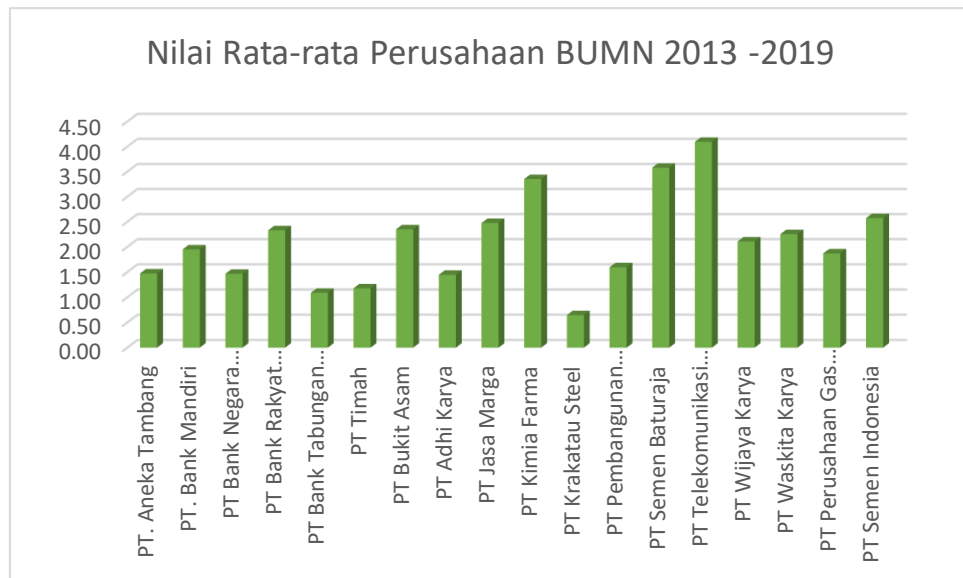
Peran PKBL BUMN diharapkan mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, yaitu : pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan pertumbuhan ekonomi (Derajat, Raharja, & Saleh, 2015). Dan merupakan tujuan dari pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran melalui PKBL BUMN.

Dalam hal ini nilai perusahaan merupakan alat ukur bagi para pemegang saham dan para investor untuk melihat apakah perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Salah satu indikator perusahaan sudah berjalan dengan baik adalah

dengan berjalannya *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance*.

Akan tetapi menjadi sebuah fenomena apabila nilai perusahaan mengalami penurunan seperti yang dilansir dalam www.kontan.co.id yang terjadi pada bulan Mei 2019. harga saham BUMN mengalami penurunan hal ini disebabkan dikarenakan adanya ancaman kembali dari perang dagang Amerika Serikat dan China serta kondisi perekonomian dalam negeri tidak cukup menompang pergerakan saham, dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun dibanding kuartal sebelumnya, penurunan sebesar 0,52% dengan kuartal sebelumnya. (Kartika, 2019)

Berikut adalah data yang diolah peneliti mengenai nilai rata-rata Perusahaan BUMN dengan menggunakan rumus PBV :



Grafik 1.1 Nilai Rata-rata Perusahaan BUMN 2013-2019

Sumber : data diolah peneliti

Dari hasil data yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat bahwa rata-rata perusahaan BUMN sebesar 2.10 dan dari 18 BUMN terdapat 9 perusahaan yang diatas rata-rata.

Dari hasil penelitian Maureen Erna Marius, dan Indah Masri (2017) yang menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang artinya semakin banyak pengungkapan CSR semakin tinggi nilai

perusahaan (Marius & Indah, 2017). Hasil Penelitian Ajeng Andriani (2018) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Andriani, 2018). Sedangkan hasil penelitian Budi Setyawan (2017) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh dengan nilai perusahaan dikarenakan investor di Indonesia cenderung membeli dan menjual saham tanpa melihat keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (Setyawan, 2017).

Dari hasil penelitian mengenai GCG Leni Yulianti (2014) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Yuliyanti, 2014). Menurut Reny Dyah Retno M. dan Denies Priantinah (2012) menyatakan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap nilai dengan variable control Ukuran Perusahaan dan *Leverage* pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010 (Retno, M. & Priantinah, 2012). Sedangkan menurut Riana Anugrah, Eliada (2015) menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Anugrah & Herwiyanti, 2015).

Terdapat banyak perbedaan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya, hasil ini menjadikan peneliti ingin meneliti kembali pengaruh dari CSR yang dimana dalam penelitian ini terdapat pembeda dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan variabel baru yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh BUMN dan GCG dengan melihat dari skor CGPI yang diberikan oleh IICG terhadap nilai perusahaan dengan objek penelitian dari perusahaan BUMN.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membuat judul penelitian "**Pengaruh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2013-2019)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, diketahui terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang dapat disebabkan berbagai faktor penelitian. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Efektivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpengaruh

- terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2019?
2. Apakah Efisiensi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2019?
 3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2019?
 4. Apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2019?
- 1.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2019
 2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode 2013-2019
- 1.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah berupa manfaat ilmu pengetahuan serta wawasan yang dapat memberikan kontribusi berupa pengembangan teori mengenai nilai tambah yang dihasilkan dari PKBL dan GCG terhadap kemampuan perusahaan dalam mendorong nilai perusahaan

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi bagaimana program kemitraan dan bina lingkungan serta *corporate governance* dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga penelitian ini mampu menjadikan referensi pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait penerapan program kemitraan dan bina lingkungan serta *corporate governance*.

b. Bagi Investor

Dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti mengenai pengaruh program kemitraan dan bina lingkungan serta *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh program kemitraan dan bina lingkungan serta *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan.

